

Februari 2019

Nomor : /TU.020/G.1/02/2019
Hal : Laporan Evaluasi Kegiatan Penyiapan Bahan
Pengelolaan Informasi Publik
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

**Yth. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas
Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal , berikut kami laporkan kegiatan Penyiapan Bahan Pengelolaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

**LAPORAN EVALUASI
TENTANG
PENYIAPAN BAHAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

A. Pendahuluan

1. Umum

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kita harus dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas mengenai apa yang menjadi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baik yang sudah ataupun yang sedang kita laksanakan. Saat ini kegiatan yang telah kita lakukan meliputi kegiatan bahan hukum dan literatur hukum serta peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang harus diberikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media elektronik

(website) atau lainnya sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mutlak adanya.

Kementerian Pertanian berkewajiban mempublikasikan informasi kepada publik untuk mendapat kepercayaan, komitmen dan partisipasi yang luas dalam keikutsertaanya untuk melaksanakan program-program pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan integritas yang memiliki keterampilan dan keahlian serta sikap perilaku yang baik dalam menjalankan fungsi kehumasan secara proporsional dan professional.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk melaporkan kinerja penyiapan bahan pengelolaan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan April 2019.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan penyiapan bahan Pengelolaan informasi publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan April 2019 sesuai dengan target realisasi kegiatan.

4. Dasar

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, Subagian Hukum dan Humas antara lain mempunyai tugas dan fungsi : **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik.**

C. Hasil yang dicapai

Dapat disampaikan tugas dan fungsi Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Januari 2019 antara lain :

- 1) Pada tanggal 10 Januari 2019, sesuai dengan Surat Tugas nomor B.0008/TU.040/G.1/01/2019 telah melakukan pembahasan konsep laporan PPID tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan adalah diskusi terkait penyusunan laporan PPID Pelaksana Itjentan Semester II Tahun 2018 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik melalui surat nomor : B-66/TU.030/A.7/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 hal permintaan Laporan Tahunan PPID, selanjutnya beberapa pembahasan yang dilakukan dalam menyusun laporan PPID tahun 2018, antara lain :
 - a. Dalam bentuk infografis berupa permohonan informasi Inspektorat Jenderal berupa :
 - Permohonan informasi PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018;
 - Struktur PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. Visi, Misi dan Maklumat Layanan;
 - c. Sekilas PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - d. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja;
 - e. SDM dan Anggaran PPID;
 - f. Penutup
 - g. Sekilas dan kegiatan unit kerja;
 - h. Program dan kegiatan PPID unit kerja;
 - i. SDM dan anggaran PPID;
 - j. Penutup.
- 2) Pada tanggal 25 Januari 2019, sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.0049/TU.040/G.1/01/2019 telah dilakukan pembahasan Desain Papan Informasi Itjentan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembahasan terkait konsep, materi dan bentuk informasi terkait kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian. Pembahasan dipimpin oleh Kepala

Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas serta dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Inspektorat Jenderal, perwakilan Biro Humas dan Informasi Publik yang menangani publikasi dan staf petugas teknis pada Sub Bagian Hukum dan Humas.

- 3) Pada tanggal 29 Januari 2019, sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.0063/TU.040/G.1/02/2019 telah dilakukan pembahasan Persiapan Hasil Inovasi Pertanian. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembahasan terkait desain *booth* "Satu Layanan Kementan", materi yang akan di display, bentuk permainan yang akan disajikan guna memeriahkan pameran inovasi pertanian, serta kostum apa yang akan digunakan oleh info guide sekaligus membagi jadwal petugas info guide.

- 4) Pengelolaan LAPOR!

Sebagai bentuk sinergi Pemerintah untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan yang disampaikan tertangani dengan baik, Kementerian Pertanian terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yaitu melalui Aplikasi LAPOR!.

LAPOR! Dikembangkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dikelola oleh Kementerian PANRB, dan diawasi oleh Ombudsman RI, Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai Pejabat penghubung LAPOR! Kementerian Pertanian.

Pada bulan Januari 2019, terdapat 9 permohonan informasi yang diterima oleh Admin. Dari 9 permohonan informasi tersebut, 7 permohonan dalam status selesai dan telah direspon oleh admin, namun masih terdapat 2 permohonan informasi yang masih dalam proses perumusan jawaban oleh unit kerja penanggung jawab.

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR!								
Periode Januari 2019								
No	Materi Pengaduan	Tanggal Disposisi KSP	Batas	Penanggung Jawab	Tanggal Surat	Tanggal Jawab	Status	Keterangan
			Waktu TL					
1.	Dugaan KKN dalam Seleksi CPNS 2018	07-Jan-19	12-Jan-19	Setjen	07-Jan-19	16-Jan-19	Selesai	
2.	Dugaan jawaban tes SKB CPNS Bocor	15-Jan-19	20-Jan-19	Admin	-	15-Jan-19	selesai	
3.	Penjelasan Mengenai Pupuk Ilegal	14-Jan-19	19-Jan-19	DITJEN PSP	16-Jan-19	30-Jan-19	Selesai	
4.	Informasi mengenai CPNS Kementan	11-Jan-19	16-Jan-19	Setjen	16-Jan-19	24-Jan-19	selesai	
5.	Penempatan tidak sesuai kualifikasi pendidikan	07-Jan-19	11-Jan-19	Setjen	16-Jan-19	-	Dalam proses	
6.	Impor dan ekspor dipersulit petugas karantina	08-Jan-19	13-Jan-19	Barantan	16-Jan-19	23-Jan-19	Selesai	
7.	Penetapan harga jagung di nganjuk	21-Jan-19	26-Jan-19	Admin	-	24-Jan-19	Selesai	
8.	Program cetak sawah terkendala pembebasan lahan	18-Jan-19	23-Jan-19	Ditjen PSP	28-Jan-19	-	Dlam proses	
9.	Persetujuan pemasukan unggas asal Malaysia yang belum ditandatangani	25-Jan-19	30-Jan-19	Ditjen PKH	31-Jan-19	14-Feb-18	selesai	

5) Pengelolaan Perpustakaan

Dibuatnya desain perpustakaan mini yang dapat memberikan informasi terhadap buku-buku yang dibutuhkan pemohon informasi.

D. Kesimpulan

Secara umum kegiatan Pengelolaan Informasi Publik pada Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan melakukan **Melakukan Penyiapan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Januari 2019 telah berjalan, namun harus dilakukan Koordinasi dengan UKP4 terkait Aplikasi LAPOR! Inspektorat Jenderal "Error".

E. Penutup

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

**Kepala Subbagian Hukum dan
Humas**

Eko Supriyanto, S.Sos

1. Kegiatan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi, sebagai berikut:

2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka menyediakan data perundang-undangan terkini bidang pembangunan pertanian bagi kepentingan aparat pengawas intern lingkup Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menyusun produk hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan.

Pada bulan April 2019 telah tersusun 2 (dua) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, antara lain :

- Nomor B-842/Kpts/OT.050/G/04/2019 tentang Tim Pendamping dan Pelaksana Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Melalui Program

- Nomor B-11/Kpts/OT.050/G/01/2019 tentang Tim Penilaian Kembali Barang Milik Negara Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019

3. Pengembangan SDM

Pengembangan kapasitas manajemen SDM pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud memberikan wadah/kegiatan SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan fisik/jasmani dan mental stakeholdernya. Sedangkan tujuannya adalah 1) Menjaga/meningkatkan kesehatan SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; 2) Membina mental SDM Inspektorat Jenderal; 3) Membina kesehatan jasmani anggota; dan 4) Meningkatkan wawasan SDM Inspektorat Jenderal.

Pada bulan Maret 2019, peningkatan kapasitas SDM antara lain :

- Pembinaan rohani melalui pengajian yang dilakukan setiap Jumat bertempat di Musholla Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan;
- Peningkatan jasmani melalui latihan futsal dan badminton yang dilaksanakan sekali seminggu.

4. Tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahapan yang ada antara lain menelaah disposisi atau perintah atasan, mempelajari materi terkait pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas, menyiapkan data dan materi laporan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Pada tanggal 26 April 2019, sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.0318/TU.040/G.1/04/2019 telah menghadiri launching peta okupasi sektor pertanian di hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.

